



## NOTULA

### *Ngobrol Perihal Isu dan Eskalasi Gerak (NGOBRAL IDE) Online*

#### **BBM Naik, Ada Apa?**

Hari, tanggal : **Senin, 26 Maret 2018**

Waktu : **15.45 – 18.00 WIB**

Pembicara : **Mashun Sofyan (Peneliti Lingkar Kajian Ekonomi Syariah)**

Notulen : **Silmi Hafizhah**

PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga bahan bakar minyak atau harga BBM jenis Peralite sebesar Rp 200 per liter. Pada 13 Januari, harga Pertamax yang semula Rp8.600 naik Rp200 menjadi Rp8.800. Kenaikan juga terjadi pada jenis BBM Pertamax Turbo dari Rp10.550 menjadi Rp10.800, dan Pertamina Dex dari Rp10.350 menjadi Rp10.800. Sepekan kemudian, atau pada 20 Januari, Peralite ikut naik dari Rp7.700 menjadi Rp7.800 dan Dexlite dari Rp7.450 menjadi Rp7.650. Selang lebih dari sebulan, 24 Februari 2018, Pertamina kembali menaikkan harga BBM non subsidi, dengan rincian harga Pertamax naik dari Rp8.800 menjadi Rp9.100, Pertamax Turbo naik Rp10.800 menjadi Rp11.300, Dexlite naik Rp7.650 menjadi Rp8.250, dan Pertamina Dex naik dari Rp10.800 menjadi Rp11.550. Mulai tanggal 24 Maret 2018, Pertamina kembali mengumumkan perubahan harga BBM Non subsidi. Tercatat selama tiga bulan di awal tahun 2018 ini pihak Pertamina sudah mengumumkan update harga BBM hingga 4 kali yaitu pada tanggal 13 Januari lanjut tanggal 20 Januari, 24 Februari dan yang terbaru tanggal 24 Maret 2018.

Hal ini merupakan salah satu akibat adanya regulasi yang salah dalam pengelolaan minyak di negeri ini. Misalnya, disahkannya UU Migas No. 22 tahun 2001 yang jelas-jelas membuka peluang pihak asing menguasai sumber-sumber energi di Indonesia. Ahmad Redi, pengamat hukum migas dari Universitas Tarumanegara memberikan pendapatnya terkait kenaikan BBM jenis Peralite. Berikut pendapatnya :

*“Kenaikan BBM (non subsidi) saat ini adalah akibat adanya liberalisasi barga BBM sesuai dengan mekanisme pasar. Liberalisasi ini sesungguhnya tidak cocok dengan*



*landasan Konstitusional yang mengatur bahwa migas harus dikuasai negara termasuk penetapan harga BBM yang tidak diserahkan kepada mekanisme pasar. Peran Pemerintah seolah menjadi tukang cap (hanya menetapkan) apa yang terjadi di pasar (liberalisasi migas)", ungkapnya. "Selain itu, Pemerintah tidak memiliki terobosan yang baik untuk memitigasi kenaikan ICP (harga minyak mentah). Ketika harga minyak dunia naik, Pemerintah langsung siap-siap menaikkan harga BBM dalam negeri tanpa membuat formula agar kenaikan ICP ini tidak membebani rakyat. Bila hanya business as usual dalam membuat kebijakan kenaikan harga, maka Pemerintah auto-pilot pun dapat melakukannya", tambah Redi.*

Kenaikan harga BBM lagi-lagi disesuaikan dengan mekanisme pasar dan naik turunnya harga minyak dunia. Sebagaimana alasan kenaikan BBM dari *Vice President Corporate Communication* Pertamina, Adiatma Sardjito, menyatakan penyesuaian harga BBM jenis Peralite merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus naik. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini adalah salah satu bentuk cengkaman ekonomi Indonesia oleh negara-negara kapitalis besar dunia, IMF yang dianggap sebagai salah satu instrumen alat penjajahan ekonomi dunia memberikan Pengakuan:

*"Pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional". Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000): liberalisasi dinegara-negara berkembang juga dikuatkan oleh pernyataan dari world bank. Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001) : "(Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik...Banyak subsidi*



*khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya)".*

Kebijakan menaikkan harga BBM tidak lain untuk menyelesaikan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan. Liberalisasi migas hakikatnya adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada swasta (asing) seraya mengurangi peran negara. Kebijakan ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Padahal rakyatlah pemilik sejati sumberdaya alam itu. Yang lebih menyakitkan, liberalisasi dilakukan sekadar untuk memenuhi tuntutan pihak asing (IMF, Bank Dunia, ADB, USAID, dll). Hanya demi menyenangkan pihak asing, Pemerintah tega mengabaikan keinginan mayoritas rakyatnya. Jika demikian, kebijakan menaikkan harga BBM itu pantas disebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Dalam hal ini, pemerintah tidak jeli dalam melihat permasalahan dan menetapkan solusi untuk permasalahan tersebut, setidaknya ada beberapa yang perlu kita cermati :

1. Mengapa patokan kenaikan harga BBM dengan membuat standar kepada harga minyak mentah dunia yang terus naik dan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sehingga muncul pertanyaan mendasar untuk kepentingan siapakah pemerintahan hari ini bekerja, apakah pro kepada rakyat karena pemerintah adalah wakil rakyat, atau justru pemerintah hari ini bekerja kepada kepentingan kolomrasi asing dan asing yang sengaja menjarah kekayaan negeri ini dan melumpukan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia.
2. Dampak dari kenaikan harga BBM sangat luar biasa terhadap masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah. Efek domino yang ditimbulkan adalah berkurangnya daya beli masyarakat. Akan tetapi, karena barang-barang yang sifat pemenuhannya adalah mutlak seperti halnya sembako dan kebutuhan pokok lainnya, masyarakat mau tidak mau harus membeli barang tersebut dengan harga yang cukup mahal.
3. Naiknya harga BBM berarti membuka peluang masuknya Perusahaan Asing untuk ikut bermain di sektor hilir. Dengan kisaran harga yang mendekati harga keekonomian,



maka persaingan di sektor hilir akan semakin bebas. Hal itu berpotensi untuk terjadinya liberalisasi di sektor hilir migas.

Dengan demikian, kami berpandangan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM sangat tidak tepat. Segala macam kebijakan yang diambil Pemerintah seharusnya mempertimbangkan nasib rakyat, terutama rakyat kecil. Dengan kebijakan liberal seperti ini, hanya akan menguntungkan pihak asing dan para pemilik modal. Rakyat kecil hanya bisa gigit jari.

Pemerintah sepertinya sudah kehilangan cara untuk memperbaiki perekonomian. Masalah-masalah seperti besarnya utang luar negeri, besarnya biaya logistic transportasi dalam rantai produksi barang, kasus mafia migas, atau bahkan tingkat penyerapan anggaran yang buruk merupakan beberapa dari sekian banyak masalah yang menyebabkan tidak optimalnya APBN dan mandeknya perekonomian. Bukannya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah malah memilih untuk menaikkan harga BBM yang jelas-jelas berdampak sistemik terhadap buruknya perekonomian di negeri ini.

Setelah melihat dan mengkaji persoalan negeri ini khususnya persoalan pengelolaan BMM, maka kami rumusan beberapa solusi, baik solusi taktis hingga solusi strategis dalam mengatasi persoalan sumberdaya alam dinegeri ini.

#### Solusi taktis :

- Meninjau ulang UU migas no 22 tahun 2001 yang lebih berpihak kepada pengusaha asing (pasal 22 : perusahaan yang mengeksplorasi wajib menyerahkan PALING BANYAK 25% dari produksi minyak dan gas bumi)
- Memaksimalkan kemampuan SDM Indonesia khususnya untuk menguasai teknologi tingkat tinggi seperti teknologi eksplorasi dan eksploitasi
- Melakukan penghematan pos-pos APBN dengan skala prioritas menjadi ukuran penggunaan APBN, seperti pendidikan, kesehatan dan industri tingkat tinggi

#### Solusi Strategis :

- Membangun karakter penguasa yg memiliki kepribadian yang Kuat, Berani dan Tangguh





- Membangun sebuah institusi yg mampu menerapkan solusi sistemik yg bisa menggantikan sistem neoliberal

Sumber energi pembangkit listrik sebagian besar berasal dari barang tambang, seperti migas (termasuk BBM didalamnya) dan batu bara, yang juga masuk ke dalam kepemilikan umum. Karena masuk ke dalam kepemilikan umum, barang tambang migas dan batu bara tidak boleh dikomersilkan pengelolaannya dan juga hasilnya. Barang tambang ini harus dikelola oleh pemerintah dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan rakyat. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan BBM dan listrik setiap rakyatnya, baik yang kaya atau yang miskin, yang tinggal di kota atau di pedalaman. Islam pun memandang negara dan pemerintahannya sebagai ra'in, sebagai pemimpin, yang bertanggung jawab mengurus semua urusan rakyatnya, bukan pedagang dengan prinsip untung rugi.

Kebijakan menaikkan harga BBM dalam mekanisme hari ini ditentukan oleh political wil pemerintah dan siapa yang sedang berkuasa. Tentu kenaikan harga BBM sudah diketahui oleh presiden. Selain dari siapa yang berkuasa, pihak asing juga berpengaruh mendorong agar mengurangi subsidi dan naikan harga BBM, karena Hutang negara (dalam & Luar negeri) telah menyandra politik dan perekonomian di indonesia. Sehingga peran dari pengusaha besar nasional dan multinasional ikut bermain dalam upaya liberalisasi kekayaan alam di indoensia.

Memang isu kenaikan BMM baru-baru ini kurang ramai sebagaimana kenaikan BBM tahun-tahun sebelumnya, kenaikan pertalite baru-baru ini hanya di *publish* oleh laman *website* milik pertamina dan kemudian dikutip oleh banyak media sehingga tidak ada sosialisasi diawal rencana kenaikan BBM baru-baru ini. Sebelumnya lagi rakyat diramaikan dengan isu hutang RI yang menggunung hingga 4000 T, kemudian isu infrastruktur mangkrak hingga isu bola liar EKTP. Sebelum BBM dinaikan dan isu hutang menjadi ramai, IMF telah berkunjung ke indonesia dengan beberapa agenda strategis. Jadi begitu banyak isu saat ini apa lagi mendekati tahun politik pemilihan gubernur dan pemilihan profesor 2019, tentu hal ini bisa dimainkan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Cara termudah untuk menutup kebocoran APBN dalam paradigma ekonomi liberal adalah dengan cara menambah hutang, menarik pajak kepada rakyat, hingga mengurangi



# BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Gegeut Winda Ruang 1 JL. Dr. Setiabudhi 229 - Bandung 40154  
Tlp. 082115190641 | Website: [bem.rema.upi.edu](http://bem.rema.upi.edu) | Email: [bem@upi.edu](mailto:bem@upi.edu)



subsidi dan menaikkan harga BBM. Dan yang akan dirugikan adalah rakyat sendiri sebagai pemilik sah kekayaan alam dinegeri ini. Ironis memang, kekayaan alam milik rakyat tidak kunjung bisa dinikmati secara utuh oleh rakyat (dalam berbagai bentuk dan fasilitas, misalnya pendidikan, kesehatan, keamanan dll), justru rakyat yang harus menanggung pajak yang kian hari kian besar jumlahnya sebagai sumber utama APBN. Dari informasi yang kami dapatkan, yang bekerja di PT Freeport misalnya, kebanyakan dari lulusan ITB selain dari kampus2 lainnya. Artinya SDM indonesia mampu untuk mengolah kekayaan alam yang ada, selain bisa belajar teknologi dari berbagai negeri jika belum dimiliki. Selain itu, terkesan saat ini ada 'ancaman' bagi pengkritik kebijakan dan 'kesan melarang kritik'. Sehingga isu BBM misalnya tidak sebesar dahulu. Ditambah diamnya parpol dan tokoh-tokoh yang dahulu giat sekali menolak kenaikan harga BBM namun setelah berkuasa hari ini justru diam.